PERAN POLITIK PEREMPUAN DARI PONDOK PESANTREN

(Studi Keterlibatan Perempuan Pesantren Ihyaul-Ulum Gresik Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS K S-2009 021 Sj
NO. REG : S-2009/Sj/021
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

ABDULLAH UBET
NIM : CO 2303017

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2009

Gadjah Belang
~ Jl. Jemur Wonosari Lebar No. 24 ☎ 031 - 8439407,
~ Gebang Lor No. 5 ☎ 031 - 5953789
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Ubet

NIM : CO2303017

Semester : XII

Jurusan : Siyasah Jinayah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Dsn, Mediyeng. Ds, Ketapang telu. Kec Karangbinangun Lamongan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul " PERAN POLITIK PEREMPUAN DARI PONDOK PESANTREN **(Studi Keterlibatan Perempuan Pesantren Ihyaul-Ulum Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Gresik)** " adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 15 Agustus 2009

ENAM RIBU RUPIAH 6000 Tgl. 20 METERAI TEMPEL

Abdullah Ubet

NIM. CO2303017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh ABDULLAH UBAID / NIM: C02303017 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 juli 2009

Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Istibsyaroh SH. Mag.

NIP. 150 163 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Abdulla Hubet** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 05 agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
H. Arif Jamaluddin. M. Ag	**Ahmad Mansur, BBA. MEI**
NIP. 197 211 061 996 031 001	NIP. 197 109 242 003 121 003

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Abd Salam, M. Ag	**Abd Basith Junaidy, M. Ag**	**Prof. Dr. Hj. Istibsyaroh SH. M.Ag**
NIP. 195 708 171 985 031 001	NIP. 197 110 212 001 121 002	NIP. 150 163 329

Surabaya, 26 Februari 2009

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. Ach. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195 005 201 982 031 002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian *field research*, yang berjudul " PERAN POLITIK PEREMPUAN DARI PONDOK PESANTREN (Studi Keterlibatan Perempuan Pesantren Ihyaul-Ulum Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kabupaten Gresik)" Penelitian ini untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu Bagaimana peran politik perempuan pesantren dalam pemilu legislatif tahun 2009 di kabupaten Gresik? Dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Posisi perempuan pesantren Dalam calon Pemilu Legislatif tahun 2009?

Data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara *(interview)*, observasi dan kajian pustaka. Kemudian kesimpulanya di ambil melalui teknik analisis dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, Yang pertama adalah Bagaimana peran politik perempuan pesantren Ihyaul Ulum dalam pemilu legislatif tahun 2009 di kabupaten Gresik dalam posisi dan peran perempuan pesantren Ihyaul-Ulum Dukun Gresik telah berperan aktif dalam dinamika sosial politik hingga mampu menghantarkan salah satu perempuan di dalam pemiliu legislatif tahun 2009.

Dengan demikian, politik oleh para pengasuh pesantren ihyaul-ulum di jadikan sarana untuk memperlancar jalanya syi'ar Islam. Politik merupakan bagian dari kendaraan agama. Hal ini sejalan dengan konsep *" Al-Islam Huwa Al-Dīn Wa Al-Dawlah"* (Islam adalah agama dan Negara). Oleh karena politik (kekuasaan) merupakan bagian dari urusan agama, maka berpolitik pun merupakan aktifitas yang tidak di persalahkan dalam agama, apalagi jika berpolitik demi kepentingan umat hal itu justru di anjurkan

Yang ke dua adalah Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Posisi perempuan pesantren Dalam calon Pemilu Legislatif tahun 2009 dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap peran politik perempuan. perempuan menempati kedudukan penting yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum islam yang memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang di berikan islam. Hal itu disebabkan islam datang membawa prinsip persamaan di antara seluruh manusia. tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Sebab sebagian dari mereka berasal dari sebagian yang lain. Laki-laki dari perempuan dan perempuan dari laki-laki. Tidaka da perbedaan di antara mereka dalam hal esensi alami.

Dalam tinjauan fiqih siyasah terhap peran perempuan dalam pemilu legislatif di perbolehkan asalkan dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan perempuan harus bertanggung jawab sebagaimana menjadi seorang pemimpin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

MOTTO ii

PERSEMBAHAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Kajian Pustaka 12

D. Tujuan Penelitian 14

E. Kegunaan Hasil Penelitian 14

F. Definisi Operasional 15

G. Metode Penelitian 17

H. Sistematika Pembahasan 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II PEREMPUAN DALAM POLITIK MENURUT PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH

A. Politik bagi Perempuan 22

1. Pendapat Konservatif……..... 23

2. Pendapat Liberal-Progresif…….. 24

3. Pendapat Apologis…….. 26

B. Hak-Hak Permpuan dalam Politik 26

1. Kebebasan untuk Menyampaikan Pendapat……..... 29

2. Hak terhadap Pemilihan……..... 30

3. Hak Mendapat Perlindungan Kehormatan……... 32

4. Hak Pengawasan…… 33

C. Kepemimpinan Perempuan 33

D. Bai'at dan Syura 36

E. Kegiatan Politik 37

BAB III. PERAN POLITIK PEREMPUAN PESANTREN IHYAUL-ULUM DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009

A. Gambaran Umum Pesantren Ihyaul-Ulum Dukun Gresik.....… 39

B. Pola Keterlibatan Pesantren Ihyaul-Ulum Dalam Politik Praktis... 39

C. Motifasi Dan Orentasi Pesantren Ihyaul Ulum Dalam Politik..... 42

D. Keterlibatan Perempuan Pesantren Dalam Dunia Politik Di Kabupaten Gresik 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Afiliasi Politik Perempuan Pesantren Ihyaul-Ulum Dalam Pemilu Legislatif 47

F. Peran Politik Perempuan..... 51

BAB IV ANALISIS PERAN POLITIK PEREMPUAN PESANTREN MENURUT FIQIH SIYASAH PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KABUPATEN GRESIK

A. Peran Politik Perempuan Pesantren Ihyaul-Ulum Dukun Gresik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009..... 54

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran politik perempuan Dalam Proses Pemilu Legislatif..... 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia. Dalam wacana Islam, politik (*al-siyasah)* secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat

Islam adalah agama yang melindungi setiap hak-hak manusia tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, yang membedakan adalah tingkat ketakwaan manusia itu sendiri. Di antara hak-hak manusia itu adalah hak untuk memperoleh pekerjaan, sebab dalam Islam tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan. Islam bahkan menganjurkan manusia bekerja untuk menjadikan kesejahteraan dan ketentraman keluarga. Islam mempunyai posisi yang unik karena mengakui status ekonomi perempuan yang independen dan memberi hak untuk memiliki, menggunakan dan menikmatinya tanpa perantara atau wali.[1]

Selama ini, politik dan prilaku politik dipandang sebagai aktivitas maskulin. Perilaku politik yang dimaksudkan di sini mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Ketiga karakteristik tersebut tidak

[1] Muhammad Qutub, *Islam The Misunderstood Religion*, Terj. Fungky Kusnaedi Timur, *Islam Agama Pembebas*. h. 212-213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Karena itu masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan agresif, sebagai orang yang tidak dapat diterima atau diinginkan. Dengan ungkapan lain perempuan dengan karakter seperti itu bukan tipe perempuan ideal.

Padahal ada tiga unsur yang merajut kepemimpinan dalam diri seseorang, yaitu kekuasaan, kompetensi diri, dan agresif kreatif. Kekuasaan, sebagai unsur penting dalam membangun dan memimpin seseorang, selalu didefinisikan sebagai kekuatan atau ketegaran atau kemampuan bertindak yang diperlukan guna mencapai sesuatu demi tujuan yang lebih besar. Pada hakekatnya, kekuasaan bersifat netral, bisa digunakan untuk kebaikan dan sekaligus untuk kejahatan.[2]

Kajian tentang perempuan dan gender terus menemukan momentumnya, perhatian hampir tidak pernah di berikan kepada ulama perempuan. Terdapat cukup banyak ulama perempuan dan sekaligus para perempuan yang memiliki peran penting dalam keilmuan Islam. Demikian juga terdapat perempuan-perempuan yang memiliki peran krusial dalam pembentukan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan lain-lain.

Meski demikian, masih banyak yang harus dilakukan untuk mengungkapkan sejarah keulamaan dan keilmuan di kalangan perempuan

[2] Siti Musdah Mulia & Anik Faridah. *Perempuan dan Politik*, h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim, tidak hanya di Timur Tengah dan kawasan muslim lain, tetapi juga di Indonesia. Sebab seperti disimpulkan baik setelah mengkaji kehidupan keagamaan perempuan muslim. Posisi perempuan dalam masyarakat muslim termasuk di Indonesia tidak bisa dipahami tanpa apresiasi menyeluruh tentang konteks di mana mereka hidup, berbagai faktor budaya, politik, ekonomi, sosial dan bahkan agama saling mempengaruhi dalam menentukan posisi perempuan, tidak terkecuali ulama perempuan.

Di sini faktor religio-sosiologis menjadi sangat penting. Di lingkungan masyarakat muslim Indonesia. Seseorang baru benar-benar diakui sebagai ulama, jika telah diakui oleh komunitas nya sendiri sebagai ulama. Pengakuan itu datang bukan semata-mata mempertimbangkan keahlian dalam ilmu agama, khususnya fiqh, tetapi juga integritas moral dan akhlak nya dilengkapi dengan kedekatan dengan umat, khususnya pada tingkat *grass root* (akar rumput). Kedekatan dengan umat di lapisan bawah ini bisa disimbolkan dengan kepemilikan dan pengasuhannya terhadap pesantren atau madrasah. Seperti lazimnya di lingkungan NU.[3]

Peranan perempuan untuk tugas-tugas seperti itu tidak dibedakan dari laki-laki. Potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan untuk bertindak secara otonom diperlukan bagi tanggung jawab menunaikan amanah tersebut. Pembahasan tentang perempuan sebagai suatu kelompok memunculkan sejumlah

[3] Jajat Burhanudin. *Ulama Perempuan* Indonesia. h.81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesulitan. Konsep "posisi perempuan" dalam masyarakat memberi kesan bahwa, ada beberapa posisi vital yang diduduki oleh perempuan di semua lapisan masyarakat. Kenyataannya bahwa, bukan semata-mata tidak ada pernyataan yang sederhana tentang "posisi perempuan" yang universal, tetapi di sebagian besar masyarakat tidaklah mungkin berkata bahwa perempuan sebagai kelompok yang memiliki kepentingan bersama. Perempuan ikut andil dalam stratifikasi sosial di masyarakat. Ada perempuan kaya, ada pula yang miskin, ada yang pandai, ada pula yang bodoh. Selain itu, latar belakang kelas kaum perempuan mungkin sama penting dengan gendernya dalam menentukan posisi mereka di masyarakat.[4]

Pada dasarnya perbedaan laki-laki dan perempuan dapat diwakili oleh dua konsep, yaitu jenis kelamin dan gender. Perbedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan fisik, terutama pada perbedaan fungsi reproduksi. Sementara itu gender merupakan konstruksi sosio-kultural. Pada prinsipnya gender merupakan interpretasi kultural atas perbedaan jenis kelamin. Bagaimanapun gender memang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi tidak selalu berhubungan dengan perbedaan fisiologis seperti selama ini banyak dijumpai dalam masyarakat.[5]

Dalam al-Qur'an telah jelas terungkap bahwa kedudukan dan kemuliaan seseorang baik laki-laki maupun perempuan dinilai bukan dari kekuatan

---

[4] Istibsyaroh, *Hak-Hak Permpuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi,* h. 64
[5] Fauzi Ridjal (ed), *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia*, h.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(superioritas) maupun kepintarannya. Tetapi lebih karena ketakwaannya, firman Allah :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

> "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. *(QS. Al- Hujurat : 13).*[6]

Dari ayat tersebut maka jelaslah bahwa Islam itu menghargai harkat, martabat, derajat, hak setiap perempuan, tanpa membedakan dengan laki-laki. Perempuan bebas untuk mengembangkan ekonominya dan tidak lagi termarginalkan[7]

Perempuan kini berhadapan dengan perspektif modernitas yang semakin terbuka lebar. Keterbukaan ruang bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan sampai setinggi-tingginya telah melahirkan kemampuan-kemampuan *(al-ahliyah)* mereka dalam segala urusan yang sebelumnya diklaim hanya menjadi milik laki-laki. Persepsi tendensius bahwa kaum perempuan kurang rasional, lebih emosional dan kurang kompenten menangani urusan domestik dan publik dibanding kaum laki-laki kini telah gugur dan tidak lagi popular. Kaum

[6] Depag RI, Jakarta. h. 848
[7] Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosia*l, h. 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan kini tengah bergerak merengkuh masa depanya dan mengubur masa lalu yang suram dan penuh nestapa.[8]

Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan juga laki-laki untuk menjalani peran-peran politik domestik maupun publik, untuk menjadi cerdas dan terampil. Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Umm Salamah, dan para isteri Nabi yang lain, adalah perempuan-perempuan terkemuka yang cerdas. Mereka sering terlibat dalam diskusi-diskusi tentang tema-tema sosial dan politik bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah *baiat* (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah.[9]

Sayangnya dalam perjalanan sejarah politik kaum muslimin partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktivitas perempuan di batasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan-pembatasan bukan hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Sejarah politik Islam sejak wafatnya Nabi Muhammad dan masa khulafaal rasyidun

[8] Husein Muhammad.*Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*, h. 251
[9] Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan,* h. 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai awal abad XX tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik.[10]

Beberapa kalangan, lebih-lebih kaum feminis dan gerakan perempuan, menghubungkan kasus-kasus perempuan yang selalu menjadi korban dengan sistem sosial patriarkhis yang berlaku dalam masyarakat kita. Suatu sistem sosial yang berpihak pada dan dominasi kaum laki-laki. Sistem yang demikian dinilai merugikan kaum perempuan, bahkan menjadikan kaum perempuan sekedar sekrup kecil atau pelengkap dalam bangunan sosial.[11]

Bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, status ”setara” bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik yang sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD 1945. Terlepas masih ada persoalan diskriminasi terhadap perempuan, sejumlah kemajuan atas status perempuan telah dicapai. Proses kemajuan bagi perempuan akan terus berlanjut, terutama pada proses demokratisasi yang ditandai dengan diselenggarakannya pemilihan umum.

Namun, dalam tataran realitas masih mengalami banyak tantangan dan hambatan, baik secara internal maupun eksternal. Sekedar contoh, adalah penetapan kuota 30% bagi perempuan sebagai calon anggota legislatif dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Yang menyatakan bahwa :

---

[10] Ibid…….h. 167

[11] Haedar Nashir, *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*, h. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPRRI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %"[12]

Sebagai gambaran, di DPR-RI perempuan hanya mendapatkan 11,27% dari 550 orang, di DPD perempuan mendapat 21% dari 128 orang, dan di DPRD propinsi hanya 9% dari 1.849 orang. Padahal ketika itu, kampanye perempuan memilih perempuan diapresiasi oleh banyak kalangan dan pendidikan politik untuk masyarakat boleh dibilang lumayan besar. Fakta tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik masih menghadapi tantangan dan hambatan. Pada kasus Pemilu 2004, dari sisi isi (content) hukum, seperti yang kita tahu, masih setengah hati dan tidak ada sanksi, begitu juga dari sisi struktur maupun kultur nya, masih sangat bias gender. Apalagi dengan ditolaknya kuota dalam undang-undang Partai Politik pada tahun 2002, membuat tidak kondusif penempatan perempuan dalam nomor urut pencalonan pada Pemilu 2004 sehingga sangat merugikan kaum perempuan.

Hal yang menarik dalam perhelatan politik akbar tersebut adalah keputusan politik yang mendapat respon positif dari partai-partai politik peserta pemilu, termasuk partai politik yang pada tahun 1999 pernah menolak presiden perempuan. Realitas ini sungguh berbeda dengan tradisi dan pikiran keagamaan yang selama ini mereka anut. Responsi dan akseptabilitas terhadap partisipasi

[12] Undang-Undang PEMILU. h. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik perempuan tersebut diharapkan bukan hanya kepentingan politik sesaat demi menarik dukungan kaum perempuan untuk sebuah kemenangan dalam perebutan kekuasaan, tetapi karna agama memang mengabsahkan ruang politik yang luas bagi perempuan.

Gerakan kaum perempuan Indonesia membangun masa depanya untuk sebuah masa depan bangsa yang lebih adil. Kehadiran perempuan secara lebih massif dalam panggung politik struktural diharapkan akan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan negara yang dapat memberdayakan berjuta-juta kaum sejenisnya, menghapus kultur diskriminatif dan menghentikan kekerasan terhadap mereka yang masih terus berlangsung secara eskalatif baik di ruang keluarga maupun sosial. Kemampuan perempuan dalam kerja-kerja politik tersebut tentu akan diuji oleh sejarah. Dan, bangsa Indonesia pasti berharap dengan optimis bahwa ketelibatan kaum perempuan dalam porsi yang lebih besar pada wilayah ini akan memberi manfaat besar bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang

Contoh konkrit adalah dengan menyaksikan banyaknya kaum perempuan yang telah berupaya untuk menjadi pemimpin, presiden, bahkan banyak juga mereka yang ikut serta andil dalam mencalonkan anggota legislatif. Mereka meyakinkan dirinya sendiri akan mampu untuk berpikir dan berpendapat serta menjalankan suatu proses menuju bangsa yang adil, makmur yang diharapkan oleh semua masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam skripsi ini kami mengambil kajian-kajian yang berkenaan dengan popularitas gender yang terkait dengan kekuasaan dan kepemimpinan yaitu mereka calon anggota *legfislatif* (caleg) yang sekarang banyak didominasi oleh kaum perempuan, seperti halnya perangkat pondok pesantren yang secara kultural-emosional lebih dekat dengan NU, yang dianggap mumpuni dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan bisa menjadi memimpin yang lebih baik. Dalam hal ini kami akan memaparkan lebih jelas peran mereka dan berusaha mengetahui kinerja, terutama dalam wilayah politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan kaumnya serta upaya pemberdayaan masyarakat.

Proses pemberdayaan harkat dan martabat perempuan ini, terutama dalam lingkup lokal, juga menjadi daya tarik tersendiri di Kabupaten Gresik. Meskipun panggung politik lokal banyak didominasi oleh kaum laki-laki, namun upaya kaum perempuan menunjukkan eksistensinya di ruang publik layak diapresiasi.

Secara sosiologis, Kabupaten Gresik terletak di kawasan pantura (pesisir). Sebagaimana masyarakat pesisir, konstruksi dan komposisi penduduk begitu plural, dari berbagai etnis, namun tetap didominasi oleh etnis Jawa. Secara keagamaan, Masyarakat Gresik di dominasi oleh umat Islam. Secara kultural keagamaan, tradisi Islam tradisionalis ala NU cukup dominan. Sebagaimana diketahui, kultur nahdliyyin ini ditopang oleh keberadaan pesantren yang banyak terdapat di kabupaten ini. Di antara pesantren yang cukup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpengaruh di Gresik adalah PP. Ihyaul Ulum di Kec. Dukun, mampu menjadi magnet masyarakat Gresik dalam pendidikan keagamaan dan proses pilihan politik para santri, alumni, maupun masyarakat sekitarnya.

Terpilihnya perempuan berlatar belakang pesantren, menunjukkan bahwa secara kultural, posisi politik perempuan menunjukkan perkembangan signifikan. Perempuan pesantren ternyata mampu menjadi anggota dewan. Sebuah prestasi yang pantas diapresiasi.

Dalam posisinya sebagai perempuan pesantren sekaligus anggota dewan, seorang perempuan menunjukkan pengaruhnya—baik di bidang pendidikan maupun politik. Hal ini merupakan sebuah nilai plus atas keterbukaan masyarakat Gresik dalam proses kesetaraan gender, baik di bidang politik maupun pendidikan. Bahkan jika di lihat prosentase keterwakilan kaum rakyat di kursi anggota dewan, terutama di Jawa Timur, menunjukkan perkembangan wacana kesetaraan gender yang mulai diterima masyarakat. Mereka juga banyak yang berlatar belakang sebagai pengasuh maupun pengajar di pesantren.

Untuk itulah, melihat realitas ini, baik dalam skala Jawa Timur maupun Kabupaten Gresik, keterlibatan kaum perempuan yang berlatar belakang pesantren menjadi sebuah fenomena menarik. Maka dalam skripsi ini, agar lebih fokus dan mendalam, penulis berusaha meneliti keterlibatan dan peranan politik perempuan pesantren dalam proses demokratisasi di wilayah Gresik. Hal ini menjadi bahan penelitian penulis, sebab baik menjelang pemilu maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesudahnya, peranan politik perempuan menjadi sangat signifikan, terutama jika dikaitkan dengan pemberdayaan kaumnya dan proses mengemban amanah rakyat.

Sebagai seorang yang lahir, tumbuh, dan mendapat pendidikan agama di pesantren—peranan perempuan dalam politik menjadi fokus penelitian penulis dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, peneliti akan membahas bagaimana peran politik perempuan pesantren dalam proses menuju pemilu legislatif. Maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peran politik perempuan pesantren dalam pemilu legislatif tahun 2009 di kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Posisi perempuan pesantren Dalam calon Pemilu Legislatif tahun 2009 ?

C. Kajian Pustaka

Kajian tentang perempuan dalam politik telah banyak di tulis oleh para pemikir dan teman-teman dalam Skripsinya, berdasarkan temannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Amatullah Shafiyyah dalam bukunya Kiprah Politik Muslimah Konsep Dan Implementasinya. Yang di dalam buku ini menjelaskan tindakan politik atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan istilah partisipasi politik, bagi kaum muslimah terasa begitu jauh. Politik di abad-abad terakhir telah menjadi ruang yang gelap dan tabuh bagi muslimah. Para muslimah dan juga kaum perempuan pada umumnya. Pada saat ini, para muslimah—dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda—disadari atau tidak telah melakukan aktivitas politik. Contoh partisipasi politik yang paling sederhana dan hampir di lakukan semua orang adalah ikut dalam pemilihan umum (pemilu)[13]

Nur Laili Rohmah Fakultas Ushuludin Jurusan Aqidah Filsafat tahun 2004. Peranan Perempuan Dalam Politik Menurut Pandangan Islam. Yang di mana isi dari skripsi ini tentang perempuan yang memangku jabatan menurut pandangan Islam. Islam mengakui adanya persamaan kedudukan dalam masyarakat, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal itu disebabkan Islam datang membawa persamaan antara laki-laki dan perempuan, sebab. Sebagian dari mereka berasal dari sebagian yang lain. Laki-laki dari perempuan dan perempuan dari laki-laki. Tidak ada perbedaan antara mereka dalam hal esensi alami sehingga keduanya di bebani hak dan kwajiban yang sama untuk menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar walaupun ada perbedaan berkaitan dengan status dan peranan masing-masing.[14]

---

[13] Amatullah Shafiyyah. Kiprah Politik Muslimah Konsep Dan Implementasinya.

[14] Nur Laili Rohmah. Peranan Perempuan Dalam Politik Menurut Pandangan Islam. Skripsi fak.ushuludin thn. 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

So'idah. Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah. Tahun 2002. skripsi yang berjudul Peranan Wanita Dalam Bidang Politik Di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Islam. Yang di mana, di dalamnya. Hukum Islam membolehkan wanita untuk memegang peranan dalam dunia politik pada masa sekarang ini jika dia memang mempunyai potensi dan mampu menangani di bidang politik tersebut. tanpa berbenturan dengan kemaslahatan umat dan keluarga.[15]

Dan skripsi saya ini yang berjudul peran perempuan pesantren ihyaul ulum terhadap pemilu legislatif tahun 2009 di kabupaten gresik. Menjelaskan di mana peran seorang perempuan pesantren ini dalam pemilu legislatif tahun 2009 di kabupaten gresik Dalam skripsi ini kami mengambil kajian-kajian yang berkenaan dengan popularitas gender yang terkait dengan kekuasaan dan kepemimpinan yaitu mereka calon anggota *legfislatif* (caleg) yang sekarang banyak didominasi oleh kaum perempuan, seperti halnya perangkat pondok pesantren yang secara kultural-emosional lebih dekat dengan NU, yang dianggap mumpuni dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan bisa menjadi memimpin yang lebih baik.

D. Tujuan Penelitian

[15] So'idah. Peranan Wanita Dalam Bidang Politik Di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Islam. Skrisi fak. Syari'ah thn. 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran politik perempuan pesantren di Pondok Pesantren ihyaul-ulum Dukun Gresik pada pemilihan legislatif tahun 2009
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Posisi perempuan dalam calon Pemilu Legislatif tahun 2009 di kabupaten gresik

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna:

1. Secara Teoritis:
   a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam fiqh siyasah terutama dalam kaitannya dengan peran politik perempuan pesantren yang terdapat di kalangan pesantren Ihyaul Ulum.
   b. Untuk memahami betul-betul langkah politik perempuan pesantren dalam proses pemilihan legislatif di kabupaten gresik.
   c. Untuk meninjau kembali Fiqh Siyasah Terhadap Peran dan Posisi perempuan dalam Proses Pemilihan legislatif tahun 2009.
2. Secara Praktis: untuk dijadikan bacaan, referensi, dan rangsangan bagi penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan tentang peran politik perempuan pesantren di lingkungan pondok pesantren Ihyaul Ulum dalam pemilu legislatif di gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

1. peran : adalah laku; hal berlaku/bertindak; pemeran; pelaku; pemain.[16]
2. Politik : adalah aktifitas manusia yang bermaksud untuk mengatur kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat unsur kekuasaan untuk membuat aturan hukum dan melaksanakannya dalam kehidupan masyarakat.[17]
3. Pesantren : Perguruan pengajian islam.[18]
4. Pemilu Legislatif : Pemilihan umum secara langsung yang diadakan untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berwenang membuat undang-undang; atau sebagai lembaga perundang-undangan.[19]

peran politik perempuan pesantren adalah di pelaku kekuasaan untuk membuat aturan hukum dan melaksanakannya dalam kehidupan masyarakat di

[16] Pius A. Partanto, dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, h. 9
[17] Ibid. *Kamus Ilmiah*……h. 609
[18] Ibid. *Kamus Ilmiah*……h. 584
[19] Ibid. *Kamus Ilmiah*..... h.56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kancah politik atau pemilu legislatif terutama pada tahun 2009 di Kabupaten Gresik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.[20]

Untuk menyelesaikan permasalahan di dalam penelitian ini, agar hasil penelitian ini bermakna, Penulis menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan. Artinya setelah mengetahui gambaran tentang kiprah perempuan dalam politik, kemudian penulis menganalisis tentang bagaimana peran polotik perempuan pesantren Ihyaul-Ulum Dukum Gresik menurut fiqh siyasah.

2. Data Yang Dikumpulkan

   a. Data yang berkenaan dengan peran politik perempuan pesantren dilingkungan pondok pesantren Ihyaul-Ulum Dukun Gresik
   b. Data yang berkenaan dengan pemahaman atau pendapat terhadap peran dan posisi perempuan dalam proses pemilu legislatif dalam fiqh siyasah

[20] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data.

   a. Sumber Data Primer : Sumber yang dihasilkan dari observasi dan wawancara dengan perempuan pesantren yang terlibat dalam percaturan politik di wilayahnya, yaitu di Kabupaten Gresik

   b. Sumber Data Skunder : Yaitu literatur-literatur masalah perempuan dalam berpolitik diperoleh dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah perempuan dalam berpolitik.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

   Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan tahapan teknik sebagai berikut :

   a. Wawancara atau interview adalah mengadakan wawancara dengan informan dalam hal ini yang menjadi informan adalah perempuan pesantren di kabupaten Gresik yang terlibat dan memiliki peranan dalam politik.

   b. Observasi adalah dengan melihat atau mencatat sendiri peristiwa yang terjadi di lapangan.

   c. Dokumenter adalah sebuah data yang ada di lingkungan pondok pesantren Ihyaul-Ulum di Dukun Gresik yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai pelengkap penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kajian pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang membahas tentang perempuan dalam berpolitik.

5. Teknik Analisis Data

Skripsi ini termasuk dalam penelitian secara ilmiah dan dengan metode yang sistematis. Karena itu dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

Metode Induktif yaitu sebagaimana diungkapkan Sutrisno Hadi bahwa "berfikir induktif berarti berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit itu kemudian ditarik generalisasi yang bersifat kongkrit dan umum.[21]

Metode ini digunakan untuk membahas masalah dengan jalan mengumpulkan data-data dan menguraikan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa kongkrit dan ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu peran politik perempuan pesantren dalam proses Pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Gresik, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum untuk memetakan peran politik perempuan pesantren di Ihyaul-Ulum Dukun Gresik.

H. Sistematika Pembahasan

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1,* Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987, h.42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Supaya pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah maka penulis menguraikan bab demi bab. Dari bab tersebut di bagi menjadi sub bab, kemudian untuk menjadi jelasnya penulis paparkan sebagi berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran umum yang membuat pola dasar penulisan skripsi ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua merupakan landasan teoritik yang mengkaji tentang perempuan dalam politik menurut prespektif fiqih siyasah, dari berbagai sudut pandang.

Bab ketiga berisi tentang data-data di lapangan terkait dengan keterlibatan perempuan pesantren dalam proses pemilu legislatif pada tahun 2009 di Kabupaten Gresik

Bab keempat menjelaskan analisa tentang peran poltik perempuan pesantren Ihyaul-Ulum beserta tinjauan fiqh siyasah dalam proses pemilu legislatif tahun 2009 di kabupaten Gresik. Dalam hal ini penulis juga menganalisa motif dan faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan dan peranan perempuan pesantren dalam bidang politik.

Bab kelima Penutup bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas pertanyaan pada rumusan masalah, sedang saran adalah harapan penulis selesai mengadakan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEREMPUAN DALAM POLITIK MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAAH

A. Politik Bagi Perempuan

Politik pada hakekatnya adalah kekuasaan *(power)* dan pengambilan keputusan. Lingkupnya dimulai dari institusi keluarga hingga institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu pengertian politik pada prinsipnya meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki.[1]

Ketika bicara politik, harus berbicara insan politiknya. Insan politik yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai pelaku dan sekaligus obyek politik. Pada dasarnya semua wacana pelaku politik telah menjadi kajian dan ulasan dari kiab-kitab fiqh politik, namun dalam hal ini masih ada wacana pelaku politik yang terlupakan, yaitu wacana politik kaum perempuan. Sebagai salah satu pelaku dan pencipta wacana politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti

[1] Siti Musdah Mulia. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis,* h. 275

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan.[2]

Oleh karena itu kedudukan perempuan dalam fiqh politik ini merupakan agenda tersendiri dan sangat penting untuk dilihat. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan berpolitik ada tiga pendapat yang berkembang sebagaimana yang diterangkan di bawah ini.

1. Pendapat Konservatif

   Pendapat konservatif ini mengemukakan argumentasi bahwa dalam praktik politik, Islam tidak mengakui persamaan politik antara laki-laki dan perempuan. Ulama-ulama yang mendukung pendapat seperti ini, misalnya, Imam al-Ghozali yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak bisa didudukan sebagai imam (kepala negara). Menurutnya bagaimana bisa seorang perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberi kesaksian dalam pelbagai persoalan keputusan hukum.[3] Pendapat yang sama dilontarkan juga oleh al-Qalqasyandi. Dengan jelas ia mengatakan bahwa

---

[2] . Syafiq Hasyim *Hal-Hal Yang Tak Terpikiurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam.* h. 189

[3] Ibid..h.191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dilarang menjadi kepala pemerintahan karena dia memiliki kekurangan dalam dirinya. Mereka berlandasan dari hadist :

... لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةٌ (رواه البخارى)

> "tidak akan berjaya suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka"(H.R. Bukhari)

Hadits ini dari segi riwayah tidak seorangpun pakar Hadits yang mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi *diroyah; dalalah* hadits ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang tampuk kekuasaan negara.

Menurut faham *konservatif* ini, Islam telah menentukan peran perempuan dalam wilayah khusus *(domestic role).* Menurut mereka, Islam tidak pernah menyandarkan urusan publik kepada perempuan, bahkan sejak masa kenabian tak satupun perempuan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan politik.

2. Pendapat Liberal-Progresif

Pendapat liberal-progresif adalah yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik. Secara eksplisit kelompok ini mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki. Kaum ulama dari golongan dari kelompok Khawarij dan Musyabbihah menggunakan dalil-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil al-Qur'an tentang konsep *'adalah* (keadilan) dan *musawah* (persamaan) yang selalu dijunjung tinggi dalam Islam.[4] dan juga sebagai organisasi Islam terbesar di indonesia , Nahdlatul ulama (NU) tidak saja selalu menghiasi wacana publik Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan dan pemikiran keislaman yang berwawasan kebangsaan, respon terhadap perubahan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal nusantara. NU selalu memposisikan diri sebagai jangkar nusantara, terutama yang digalang oleh kader-kader mudanya.

Mereka mempunyai gagasan keagamaan progresif dalam merespon modernitas dengan menggunakan basis pengetahuan tradisional yang mereka miliki setelah di persentuhkan dengan pengetahuan baru dari berbagai khazanah modern. Mereka tidak hanya peduli dengan modernitas yang terus di kritik dan disikapi secara hati-hati, tetapi juga melakukan revitalisasi tradisi.[5]

Dalam konteks ini, NU menjadikan kepercayaan teologis sebagai basis pengembangan masyarakat dengan mengusung isu-isu universal seperti, HAM, demokrasi, civil society termasuk juga kesetaraan gender

Dengan munculnya calon-calon ulama perempuan di Indonesia ini sebagai salah satu indikator awal akan terbebasnya perempuan dari belenggu penindasan dan ketidakadilan. Pengertian ulama sebagai penerus Nabi (*al-*

[4] Ibid.h. 192
[5] www. gp-ansor.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'ulama'u waratsatul ambiya') tidak hanya tertentu bagi kaum laki-laki. Perempaun yang seringkali hanya ditempatkan di dalam rumah, sudah saatnya tampil ke ruang publik untuk mengayomi seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan. Pada biasanya, laki-laki dengan sifat keperkasaannya menjadi ulama atau pimpinana agama, sehingga tidak jarang ia anarkis dan destruktif. Dengan demikian, kehadiran ulama perempuan menjadi sungguh dinantikan oleh seluruh umat manusia

3. Pendapat Apologis

Pendapat apologis adalah yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang bisa dimasuki perempuan dan ada wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik perempuan adalah menjadi ibu. Di samping itu, kelompok ini masih menganggap bahwa porsi emosional perempuan lebih besar di bandingkan dengan porsi rasionalnya.[6] Ketiga pendapat ini pada dasarnya mewakili corak pandang para ahli fiqh zaman klasik.

B. Hak-Hak Perempuan Dalam Berpolitik

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan ayat yang menyangkut berbagai sisi kehidupannya. Adapula yang menguraikan

[6] . Syafiq Hasyim *Hal-Hal Yang Tak Terpikiurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam.* h. 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah kemanusiaan secara umum, misalnya dalam surat an-Nisa'ayat 32 yang menunjukkan hak-hak perempuan.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ...

"Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan"...[7]

Menurut ayat di atas hak politik menurut ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota dalam organisasi politik seperti hak memilih (dan dipilih,) mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Selain itu, hak politik bisa diartikan sebagai hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola negara.

Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh hak-hak politik. Masalah hak perempuan dalam pencalonan memiliki dua dimensi lain, yaitu pertama : perempuan menjadi anggota di parlemen, kedua : ikut serta dalam pemilihan anggota di parlemen.

Untuk mengetahui ketentuan dalam kedua masalah ini, yang pertama mengandung kewenangan dalam urusan-urusan umum, maka harus dijelaskan

[7] Depag RI. Alqur'an dan terjemah, Jakarta. h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kewenangan itu ada dua, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus.

Kewenangan umum adalah kekuasaan dalam urusan-urusan masyarakat, seperti kewenangan pembuatan undang-undang, keputusan proses pengadilan, implementasi hukum, dan kontrol terhadap para penegak hukum.

Sedangkan kewenangan khusus adalah kekuasaan mengatur masalah tertentu, seperti wasiat kepada anak yang masih kecil, kewenangan terhadap harta, dan pengaturan wakaf.

Syariat memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kewenangan yang nomor dua di atas. Dalam hal itu, ia memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki, sebagaimana memiliki kekuasaan dalam mengatur kepentingan-kepeningan khusus dirinya.[8]

Pendapat ini didasarkan pada surat At Taubah : 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> ”Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rosul-Nya. Mereka itu akan di beri rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana.” (QS. At Taubah[9]:71)[9]

---

[8] Ikhwan Fauzi, *perempuan dan kekuasaan, menulusuri hak politik dan kekuasaan gender dalam Islam* h. 36-38

[9] Depag RI, Alqur’an dan Terjemah Jakarta. h. 291

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan seperti laki-laki. Masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam poliik dan mengatur urusan masyarakat, dan mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum.

Hak-hak politik ini mencakup :

1. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan refrendum dengan berbagai cara.
2. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan anggota setempat.
3. Hak dalam pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.[10]

Berkaitan dengan posisi perempuan dan memperoleh hak-hak politik, Islam mengakui pentingnya peran kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dampaknya dalam kehidupaun politik. Oleh karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam. Sebagian hak-hak tersebut adalah sebagi berikut :

1. Kebebasan untuk Menyampaikan Pendapat.

   Saling bertukar pikiran adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Metodologi yang disusun oleh Islam untuk menciptakan sebuah

[10] Mohammad Mais Qosim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan*. Terjemah, Ikhwan Fauzi, h. 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa yang berhasil ini mengajak setiap anggotanya untuk saling menasehati dan bermusyawarah satu sama lain. Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

> ”Dan bagi orang-orang yang menerimah (mematuhi) seruan tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (di putuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. (QS : Asy-syura 42:38)[11]

Ayat di atas menjelaskan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Karena kaum muslimin disuruh menyelesaikan segala urusan mereka dengan bermusyawarah, maka semua muslim baik laki-laki maupun perempuan wajib menyampaikan pendapatnya, jika mereka merasa bahwa dengan melakukan itu mereka dapat memberikan nasehat yang berharga dan bijaksana untuk kepentingan umat Islam dan juga mengikuti prinsip menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan (amar ma’ruf nahi munkar).

Karena agama Islam menghormati hak kebebasan berfikir dan mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berpendapat ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani. Namun juga bagi warga suatu negara untuk bebas mempunyai

[11] Depad RI, Alqur’an dan Terjemah Jakarta. h. 789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berbagai masalah.[12]

2. Hak Terhadap Pemilihan

Keputusan tentang persoalan-persoalan politik sangat diperhitungkan dan dihargai dalam rangka memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan masyarakatnya sendiri.[13] Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Al-Qur'an dan rosul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa' 4:59)[14]

Ayat tersebut menjelaskan tentang administrasi pemerintahan dalam suatu negara dipercayakan bagi seorang amir atau pemimpin. Semua orang muslim yang telah dewasa mendapat hak untuk ikut serta dalam pemilihan seorang pemimpin, baik secara langsung dan tidak langsung.

Dengan demikian sebagai anggota umat secara keseluruhan, perempuan juga berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan nasib bangsanya. Karena semua individu mempunyai hak untuk memilih kepala

[12] Fatimah Umar Nasif, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*. Terj. Burhan Wirasubrata, h. 170

[13] Syekh Syaukat Hussein, *HAM dan Islam*. Terj. Abdul Rochim, h. 18

[14] Depag RI, Alqur'an dan Terjemah. Jakarta. h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara dan menduduki jabatan di jajaran pemerintahan.[15] Syura (musyawarah) menurut Al-Quran hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Ini dalam arti bahwa setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Sejarah Islam juga menunjukkan betapa kaum perempuan tanpa kecuali terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Al-Quran menguraikan permintaan para perempuan di zaman Nabi Saw. untuk melakukan bai'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> ”Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Mumtahanah : 12).[16]

3. Hak Mendapat Perlindungan Kehormatan

[15] Fatimah Umar Nasif, *hak dan kewajiban*.....h. 172
[16] Depag RI, Alqur’an dan Terjemah. Jakarta. h. 925

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak penting ketiga yang diberikan Islam kepada perempuan adalah berupa perlindungan kehormatan. Kaum muslimin dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun. Hal ini disampaikan rasulullah pada haji wada'nya. Kaum muslimin terikat untuk menjaga kehormatan orang lain, dapat dihukum oleh pengadilan hukum setelah terbukti kesalahanya. Negara juga harus melindungi kehormatan warga negaranya tanpa diskriminasi apapun. Allah berfirman didalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ...

"Hai orang-orang yang beriman. Janganlah suatu kaum mengolok-olok suatu kaum yamg lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari pada mereka....(QS. Al-Hujarat 49:11) [17]

Ayat di atas menjelaskan perlindungan kehormatan sesama manusia, harus berbuat baik dan saling tolong menolong antara sesama manusia, terlebih kaum perempuan, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk melindungi dan membela kaum perempuan, membantu integrasi mereka ke dalam masyarakat dan memberikan kehidupan yang terhormat.[18]

4. Hak Pengawasan

[17] Depag RI, Alqur'an dan Terjemah. Jakarta. h. 847
[18] Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini,* h. 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umat dan individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh jabatan dijajaran pemerintah. Dalam pekerjaan dan tingkah laku mereka menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dimaksudkan untuk meluruskan kepala negara jika dia menyimpang dari jalan yang lurus. Karena Islam telah menganugerahkan hak bagi seluruh umat manusia untuk mengecam kedzaliman pemerintah.

C. Kepemimpinan Perempuan

Sebagai seorang muslim sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai cara pandangnya dalam memandang, menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan. Di mana dalam bidang kepemimpinan perempuan, Islam bertolak dari status manusia sebagai khalifah. Akhir surat al-Ahzab mempertegas kekhalifahan manusia ini di muka bumi. Bumi sebagi pengemban amanat Allah untuk mengolah, memelihara, dan mengembangkan bumi. QS al-Ahzab ;35

إِن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصادِقِينَ وَالصادِقَاتِ وَالصابِرِينَ وَالصابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِقِينَ وَالْمُتَصَدِقَاتِ وَالصائِمِينَ وَالصائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذاكِرَاتِ أَعَد اللهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

”Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan tetap dalam ketaatanya, laki-laki dan perempuan dalam yang benar, laki-laki dan perempuan dalam keadaan sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang beresedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".(Qs al-Ahzab :35).[19]

Inilah tugas pokok manusia tidak berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Di situ disebutkan setiap orang adalah *mukallaf* (penerima amanat).

Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan kepercayaan yang tinggi, karena setiap manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin. Akan tetapi, ada manusia yang bisa merealisasikan potensinya dan ada manusia yang tidak mampu merealisasikan potensinya menjadi pemimpin. Orang yang tampil sebagai pemimpin adalah orang-orang yang melengkapi dirinya dengan segala macam persyaratan kepemimpinan.

Ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan perkembangan peradaban dan budaya manusia, yang pada giliranya menempatkan laki-laki sebagi kepala keluarga, artinya laki-laki berfungsi sebagai suami dan ayah, yang berarti pemimpin untuk seluruh keluarga. Ibu dalam pengertian pemimpin rumah tangga.[20] Pemimpin dalam hal ini mempunyai kecendrungan konotasi keibuannya, yang bertugas mendidik dan sebagainya.

Maka dalam hal ini kita harus memahami duduk persoalan kepemimpinan perempuan di dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta-fakta peradaban manusia sejak dahulu hingga sekarang, dan tidak ada kitab fiqh yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Semua

---

[19] Depag RI, Alqur'an dan Terjemah. Jakarta. h. 673

[20] Lily Zakiyah Munir. *Memposisikan Kodrat : Perempuan dan Perubahan dalam Prespektif Islam*, h. 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebudayaan mengakui hal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh memegang jabatan penting seperti jabatan kepala negara, hakim dan sebagainya. Akan tetapi, kalau di lihat realitasnya dalam sejarah Islam yang tampil sebagai pemimpin. Aisyah istri Nabi diakui sebagi seorang mufti. Maka dia memberikan fatwa kepada segenap sahabat Nabi yang lain (Abu bakar, Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya). Bahkan kedudukanya sebagai panglima pada perang unta juga diakui.[21]

Ada tiga negara Islam yang saat ini menampilkan perempuan sebagai pemimpin, yaitu Pakistan dan Bangladesh. Tentu di negara-negara tadi banyak ulama dan mengerti, namun karena luasnya wawasan mereka, maka mereka menerima perempuan sebagai pemimpin pemerintahan.

D. Baiat Dan Syura

Dalam ruang lingkup yang lebih luas (rumah tangga negara). *Baiat* [22] merupakan suatu komitmen bersama dari semua komponen masyarakat Islam untuk selalu bertindak sesuai dengan ketetapan undang-undang dan taat pada tugasnya masing-masing. Baiat merupakan jaminan sebagai legitimasi penempatan kedudukan politik termasuk bagi perempuan yang di dalamnya terdapat kesepakatan dari anggota masyarakat untuk dapat menerima perempuan

[21] Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat* .....h. 172

[22] Dalam dunia politik istilah *baiat* berarti janji setia terhadap seorang pemimpin politik. Menurut madzhab Sunni, *baiat* merupakan salah satu sarat sahnya kedudukan seseorang sebagai khalifah. Pada masa Rasulullah SAW, *baiat* yang dilakukan kaum muslimin lebih bersifat ikrar janji untuk tetap membela Islam tanpa mempunyai ikatan yang bersifat politis tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pemegang kebijaksanaan publik (yang tertuang dalam lembaga-lembaga politik).

Variabel yang kedua adalah *syura* dalam prinsip demokrasi. Musyawarah menjadi ciri utamanya. Dalam *syura* keterlibatan unsur-unsur yang berada dalam masyarakat menutup kemungkinan timbulnya konflik yang disebabkan kesalah pahaman dan ketidak sepakatan dalam menentukan suatu kebijaksanaan. *Syura* merupakan mekanisme yang terbaik untuk membuat keputusan, yang memberi peluang agar tercapai konsensus secara terbuka, yang melalui pengambilan keputusan terbaik dari berbagai pendapat tanpa adanya paksaan. Jadi walaupun pemegang jabatan kekuasaan politik itu adalah perempuan. Sebagaimana yang tercantum dalam (QS : Asy-syura 42:38) sebelumnya.

Akan tetapi hal ini berarti tetap terkontrol dalam kerangka aturan hukum yang telah disepakati. Bahkan seorang presiden perempuan pun tidak akan menjadi persoalan besar manakala sistem kontrol (legislatif melalui undang-undang dan yudikatif sebagai pengawas) dapat menjamin kelangsungan pelaksanaan sistem ketatanegaraan.

Syura merupakan media menentukan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang mempunyai wawasan berfikir luas (menerima seruan Tuhannya, mendirikan shalat, lemah lembut, tidak bersifat keras dan berhati kasar). Semua ini ditujukan pada orang-orang yang beriman secara keseluruan tidak ada perbedaan jenis kelamin, baik laki-laki atau perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga legislatif dengan menggunakan dua mekanisme tersebut dapat mengatur kompetensi politik perempuan maupun laki-laki dengan tidak adanya larangan partisipasi perempuan dalam kedudukan politik. Maka yang menjadi penentu peran atau keterlibatan mereka adalah kembali pada ukuran-ukuran semula. Yang menjadi persyaratan pejabat politik yang telah disepakati para ulama dengan mengesampingkan persyaratan gender.

E. Kegiatan politik

Kegiatan politik juga di pandang sebagai kewajiban karena itu dapat di kelompokan sebagai fardhu ain (seperti baiat atau sumpah kesetiaan dan bermusyawarah) dan fardhu kifayah (seperti jihad, jabatan pemerintah, memerintahkan kebaikan dan melarang kejelekan).

Lebih dari itu persoalan-persoalan yang menyangkut kemasyarakatan dan politik yang paling penting adalah faktor kemaslahatan. Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, mengutip ucapan ibnu Aqil dengan tegas mengatakan:

السياسَةُ مَاكَانَ فِعْلاً يَكُوْنُ مَعَهُ الناسُ اقْرَبُ اِلَى الصلاَحِ وَأَبْعَدُ عَنِ الْفَسَادِ وَإِنْ لَمْ يصعه رَسُوْلُ اللهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَلاَ يَنْزِلُ بِهِ وَحْيٌ (نقل من ابن اقيل)

> Dalam urusan-urusan politik yang di perlukan adalah cara-cara yang dapat mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan atau kebinasaan meskipun cara-cara itu tidak pernah di lakukan oleh Rasulullah dan tidak wahyu tuhan. (di kutip dari ibnu aqil)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah yang benar dalam hal ini tindak penguasa terhadap rakyatnya harus di dasarkan dalam kemaslahatan mereka. Kemaslahatan dalam kegiatan umum atau pablik antara lain dapat di tegakkan melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tirani, otoriter dan sentralistis. Jadi semua jelas dan kuat bahwa kepemimpinan pablik tidak ada kaitanya sama sekali dengan urusan jenis kelamin. Melainkan pada kualifikasi pribadi, integritas intelektual dan moral serta sistem politik yang mendukungnya.[23]

Sifat wajib, kegiatan berpolitik berdasarkan konsep perwakilan Tuhan terhadap manusia di bumi *(khalifah)* di mana laki-laki dan perempuan membawa tanggung jawab pribadi juga bersama untuk memenuhi perintah Tuhan di bumi.[24]

[23] Husain muhammad…..fiqih perempuan…….h. 51
[24] Haifa jauhad. Perlawanan perempuan…. h . 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERAN POLITIK PEREMPUAN PESANTREN IHYAUL ULUM DUKUN GRESIK

A. Gambaran Umum Pesantren Ihyaul-Ulum Dukun Gresik

Secara sosiologis, Kabupaten Gresik terletak di kawasan pantura (pesisir). Sebagaimana masyarakat pesisir, konstruksi dan komposisi penduduk begitu plural, dari berbagai etnis, namun tetap didominasi oleh etnis Jawa. Secara keagamaan, Masyarakat Gresik di dominasi oleh umat Islam. Secara kultural keagamaan, tradisi Islam tradisionalis ala NU cukup dominan. Sebagaimana diketahui, kultur nahdliyyin ini ditopang oleh keberadaan pesantren yang banyak terdapat di kabupaten ini. Di antara pesantren yang cukup berpengaruh di Gresik adalah PP. Ihyaul Ulum di Kec. Dukun, mampu menjadi magnet masyarakat Gresik dalam pendidikan keagamaan dan proses pilihan politik para santri, alumni, maupun masyarakat sekitarnya

B. Pola Keterlibatan Pesantren Ihyaul-Ulum Dalam Politik Praktis

Poa keterlibatan pondok pesantren ihyaul-ulum dalam politik tidak sebatas peran pasif tetapi aktif; baik dalam rangka mendukung partai atau penguasa tertentu atau mendelegasikan salah satu pengurus pesantren untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi calon dalam menduduki suatu jabatan. Pondok pesantren ihyaul-ulum selalu mendukung partai yang berhaluan *ahlussunnah waljama'ah*. Garis *ahlussunnah waljama'ah* merupakan garis perjuangan yang paling sejalan dengan syaria'at Islam. Di dalam nilai *ahlussunnah waljama'ah* ada perinsip *tawasuth* (sikap tengah / moderat), *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (adil), *tasamuh* (toleran), dan *amar ma'ruf nahu munkar* (menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Keberadaan Nahdlatul Ulama' yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlotul Ulama' dan seganap warganya untuk selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur. Karenanya setiap warga NU harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.[1] Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa indonesia, pondok pesantren senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Nahdlotul Ulama' secara sadar mengambil posisi yang aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945 dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara

Oleh karena euforia politik semakin dinamis era reformasi pun memberikan kran demokrasi semakin terbuka lebar, sehingga banyak

[1] H. Soeleiman Fadeli Mohammad Subhan, S.Sos. *Antologi NU, Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*. h. 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ornamen masyarakat yang berinisiatif mendirikan partai politik, termasuk NU di bawah komando KH. Abdurrohman Wahid (Gus Dur). Kemudian dengan kebijakan PBNU yang disepakati bersama oleh para pengurus dan umat NU, maka pada tahun 1999 PBNU (KH. Abdurrahman Wahid-Gus Dur) menginisiasi lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Polarisasi perempuan pesantren terhadap politik (kekuasaan) sebenarnya-disamping berangkat dari perbedaan pemahaman mereka juga karena factor pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah atau partai politik terhadap mereka. Ada beberapa cara yang di lakukan partai politik untuk mempengaruhi sikap politik perempuan pesantren. Di antaranya melalui pendekatan persuasive berupa silaturrahmi, pemberian bantuan untuk keperluan pengembangan pondok pesantren, pendekatan agama lewat pengajian (penerangan agama), kegiatan *tahlil, manakib, diba'an, hadrah* maupun kegiatan yang bernuansa Islam lainya. Selain itu, juga di tempuh melalui organisasi, yaitu perempuan pesantren yang kebetulan berstatus sebagai pengurus organisasi dan memiliki loyalitas tinggi bagi organisasinya, maka partai politik melakukan pendekatan melalui organisasinya, misalnya, perempuan yang aktif di NU, didekati melalui pintu-pintu keorganisasian NU.

Selain itu terdapat kyai yang merespons proses politik secara samar hingga tidak jelas. Mereka memandang bahwa pemerintah adalah pihak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang memiliki kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Menjauhi pemerintah dianggap tidak menguntungkan, sebab untuk mengembangkan ajaran Islam selalu memerlukan dukungan pemerintah; untuk apa pemerintah dijauhi. Menjauhi pemerintah akan berakibat menemui kesulitan bagi pengembangan dakwah dan pendidikan. Meski begitu, jangan terang-terangan dekat dengan pemerintah, sebab jika itu di lakukan, kyai akan di tinggal oleh umat. Pemerintah sudah terlanjur besar dan kuat, tetapi kyai merasa kasihan jika meninggalkan umat.[2]

C. Motifasi Dan Orentasi Pesantren Ihyaul Ulum Dalam Politik

Faktor yang mendorong pesantren ihyaul-ulum dalam politik antara lain adalah ingin berpartisipasi dan ikut serta dalam proses pembangunan terutama di daerah. Sementara itu, niat khusus pesantren ihyaul-ulum ketika terlibat dalam politik adalah agar wilayah dakwah islam lebih luas jangkauanya mudah jalanya. Hal ini sejalan dengan penegasan KH. Machfudz Ma'sum, bahwa factor yang mendorong (motivasi) pesantren dalam berpolitik praktis adalah sebuah keinginan untuk memperlancar jalanya dakwah islam.[3]

Dengan demikian, politik oleh para pengasuh pesantren ihyaul-ulum di jadikan sarana untuk memperlancar jalanya syi'ar Islam. Politik merupakan

[2] Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra politik Kyai*, h. 155-156
[3] Jurnal qualita ahsana h. 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari kendaraan agama. Hal ini sejalan dengan konsep *" Al-Islam Huwa Al-Dīn Wa Al-Dawlah"* (Islam adalah agama dan Negara).[4] Oleh karena politik (kekuasaan) merupakan bagian dari urusan agama, maka berpolitik pun merupakan aktifitas yang tidak di persalahkan dalam agama, apalagi jika berpolitik demi kepentingan umat hal itu justru di anjurkan.

Motivasi dan orientasi politik pesantren bukan karna materi, tetapi karna ingin menjadikan politik sebagai wahana dakwah atau syi'ar Islam. Pertimbangan tersebut didasarkan juga pada sebuah pemikiran, dari pada kekuasaan di pegang sama orang yang tidak jelas motifasi dan orientasinya dalam berpolitik (kaitanya dengan kepentingan rakyat), maka lebih baik pesantren mendukung calon tertentu yang sudah bisa di pegang motivasi dan orientasinya dalam berpolitik.

Dengan demikian, terlepas dari pandangan pro-kontra terhadap aktifitas pesantren dalam dunia politik, ternyata salah satu dari pengasuh pesantren ihyaul-ulum Dukun Gresik tetap aktif dalam dunia politik praktis dengan motivasi dan orientasi pada perjuangan pendidikan dan dakwah Islamiyah demi rakyat. Terlepas dari melenceng dan tidaknya motivasi dan orientasi tersebut, namun pada perinsipnya pondok pesantren ihyaul-ulum di Gresik telah mengidealkan hal itu, dan hal itu dapat disaksikan dari fenomena dan realitas politik yang terjadi di wilayah gresik; dimana Bupatinya sekarang

[4] Wawancara dengan Ibu Nyai Wafiroh Ma'sum..26-05-2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kyai Robbach ma'sum) adalah figure politisi yang di antarkan oleh pesantren dan umat NU umumnya dalam menduduki jabatannya sebagai Bupati Gresik.

Keterlibatan pesantren (di bawah bimbingan kyai atau ibu nyai nyai), merupakan upaya rasional yang di lakukan melalui pertimbangan yang matang. Keterlinatan di dunia politik bukan merupakan aktifitas yang asal-asalan. Terdapat suatu asas yang di jadikan pijakan dan pengembangan bagi pesantren ihyaul-ulum dalam aktifitasnya dalam dunia politik, yakni asas kemanfaatan. Selama aktifitas di aras politik itu dapat memberikan manfa'at bagi perjuangan pesantren dalam menyebarkan syi'ar Islam.

D. Keterlibatan Perempuan Pesantren Dalam Dunia Politik Di Kabupaten Gresik

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik sebenarnya sejak dahulu. Kalau dulu perempuan dianggap belum mampu diajak bersama-sama untuk membicarakan politik. Itu dulu, tapi dalam perkembangan berikutnya, akhirnya juga bisa terlibatkan perempuan ini, hanya saja kita gak menyalakan sistem atau bapaknya. Perempuannya yang sering di diskriminasi di semua lini. Dengan kejadian seperti itu perempuan sering di taruh di belakang, kurang maksimal. Tapi saya yakin kemampuan perempuan sama dengan laki-laki. Dan justru ada *foudnya*, misalnya perempuan punya rasa ketelatenan yang sebagian kecil di miliki oleh seorang laki-laki. Tanggung jawab,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya lebih besar perempuan, saya gak ngerti apa karna takutnya salah melangkah sehingga kalau di beri tugas itu serius sekali. Tapi bapak-bapak kan gak? Lebih nyantai. Jadi ini sebagian kelebihan dari perempuan menurut saya.[5] Jadi perempuan pantas untuk di libatkan dalam dunia politik.

Menurut saya mungkin juga seluruh perempuan yang lain melibatkan kaum perempuan dalam dunia perpolitikan itu di perbolehkan dan sah-sah saja bagi perempuan yang mampu dalam dunia politik, bukan hanya sekedar jabatan atau ingin dikenal di wilayahnya. Tapi kita harus bersungguh-sungguh menjalankan perintah agama, dengan adil dan bijaksana dalam menjalankan amanah yang di berikan masyarakat kepada kita.[6]

Kalau di cermati peran politik perempuan dari tahun ke tahun, menurut hemat saya masih sangat memprihatinkan. Secara kuantitas, caleg perempuan memang mengalami kenaikan signifikan, tetapi secara kualitas masih harus terus ditingkatkan. Politik di sini bukan hanya sekedar politik partisan *an-sich*, tetapi lebih pada politik kebijakan dan keberpihakan kepada perempuan.[7] Perempuan masih diperankan sebagai obyek dan bukan subyek dalam kehidupan politik kita. Boleh saja sejak tahun 2004 kuota sepertiga perempuan dalam pencalonan legislatif sudah dilakukan dalam pemilu, namun hal itu tidak berjalan lurus dengan keterwakilan perempuan di

[5] Wawancara dengan Ibu Nyai Wafiroh Ma'sum..26-05-2009
[6] Wawancara dengan Ibu Nyai Sakinah Ma'sum.. 26-05-2009
[7] Wawancara dengan Ibu Nyai Sakinah Ma'sum. 26-05-2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legislatif yang hanya ± 11,8 %, sehingga kita masih khawatir peran politik perempuan masih sekedar formalitas dan belum masuk pada inti persoalan.[8]

Saya sudah lama terjun di dunia politik sejak ikut PPP pada tahun 1990an. Ketika itu saya sudah masuk di pengurusan GPK (gerakan pemuda ka'bah), kalau sekarang seperti GARDA BANGSA yang ada di PKB. Saya masuk di pengurus harian kabupaten Gresik.[9]

Selama ini tidak ada masalah, artinya harus pandai-pandainya kita mengatur waktu. *Toh di dalam pondok kita gak ngijeni* (sendirian) di sini (pon-pes ihyaul-ulum) ada Bu Nyai Sakinah dan ada yang lain seperti para ustadz dan ustadzah yang lain, jadi mungkin pada waktu kita di butuhkan kita harus bisa membagi waktu. Kita menentukan dan memberikan pengarahan misalnya, hari ini, tanggal sekian dan jam sekian, kita mengenal waktu yang kosong juga. Yang ke dua, bisa jadi tidak harus tatap muka kan!! Kita memberikan bimbingan gak harus tatap muka atau gak harus ketemu memberikan ceramah itu tidak, banyak cara-cara lain yang kita sampaikan kepada santri-santri kita di dalam pondok pesantren. Dalam bahasa kita, kita mengatakan (*gak ada dalang keentekan lakon*).[10]

---

[8] Dr. Hanun Asrohah, Dkk, *Perempuan dalam Prespektif dan Aksi,* h. 117
[9] Wawancara dengan Ibu Nyai Wafiroh Ma'sum. 26-05-2009
[10] Wawancara dengan Ibu Nyai Wafiroh Ma'sum. 26-05-2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Afiliasi Politik Perempuan Pesantren Ihyaul-Ulum Dalam Pemilu Legislatif

Di mana beberapa perempuan pondok pesantren ihyaul-ulum di kabupaten gresik banyak sekali yang berafiliasi dengan PKB dengan alasan masing-masing. Saya berafiliasi dengan partai PKB. Menagapa?? Karna saya orang NU. Kedekatan NU dengan PKB bahkan semakin tak terpisahkan, ketika Abdurrahman Wahid yang mendirikan PKB ketika ia masih menjabat Ketua Umum Tanfidziyyah NU kemudian menjadi Ketua Dewan Syura PKB. Posisi sangat penting yang bukan tidak mirip dengan posisi Presiden Soeharto sebagai "Ketua Dewan Pembina" Golkar masa lalu membuat KH. Abdurrahman Wahid sangat kuat visi warga Nahdliyyin umumnya. Dengan posisi ini Abdurrahman Wahid tidak lagi sekedar bertumpu pada kharisma pribadinya sebagai mantan Ketua Umum PBNU, tetapi juga pada kerangka organisasional PKB untuk mengendalikan dan mengarahkan aktualisasi politik warga Nahdliyyin.[11]

Bagi PKB kelekatan dengan NU merupakan keniscayaan jika ingin tampil secara signifikan dalam kancah politik Indonesia. Hampir bisa dipastikan, tanpa dukungan NU, warga Nahdliyyin juga memberikan suaranya secara lebih banyak dalam Pemilu 1999 lalu kepada parpol-parpol Nahdliyyin lain, seperti Partai Nahdlatul Ummah (PNU), Partai Kebangkitan Umat (PKU), atau bahkan kepada Partai SUNI.

[11] Wawancara dengan Ibu Nyai Wafiroh Ma'sum.. 26-05-2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan terseretnya NU ke dalam politik PKB, maka "political-oriented kiyai" mendapatkan momentumnya, yang pada gilirannya mengorbankan sebagian kiyai-kiyai lain yang berusaha memelihara NU pada relnya yang benar sebagai organisasi sosial keagamaan sesuai dengan Khittah 1926. Kiyai-kiyai berorientasi politik kelihatan cukup sadar tentang hubungan yang erat antara knowledge and power (pengetahuan dan kekuatan), bahwa ilmu—apalagi ilmu agama—yang memiliki aura ilahiah—dapat diaktualisasikan ke dalam politik dan kekuasaan. Reformasi dan liberalisasi politik merupakan momentum yang sangat baik bagi para kyai berorientasi politik untuk tampil kembali.

Saya berafiliasi politik ke partai kebangkitan bangsa (PKB) versi Gus Dur. Saya mendukung keberadaan PKB sejak awalnya berdirinya PKB. Saya mendukung PKB karna nilai-nilai perjuanganya sesui dengan visi dan misi saya (yang berhaluan dengan *Ahlussunnah Waljama'ah*).[12] Sebelum PKB berdiri, saya mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah partai yang dangat getol dengan perjuangan syiar islam. Saya juga sempat bergabung dengan Partai Nahdlotul Ulama' (PNU). Setelah ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan semua partai harus bergabung dengan salah satu partai dari tiga partai yang diakui pemerintah waktu itu, yakni PPP,

[12] Wawancara dengan Ibu Nyai Sakinah… 26-05-2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

GOLKAR dan PDI. Saya bergabung dengan PPP, bahkan salah satu cacak saya (KH.Makhfudz Ma'sum) menjadi ketua PPP cabang gersik.[13]

Kalau boleh berbangga saya ingin mengatakan, tidak ada partai yang secara khusus memberikan badan otonom tersendiri. Nah, PKB membentuk sebuah organisasi perempuan yang memiliki otonomi yang sangat luas yang bernama PPKB (pergerakan perempuan kebangkitan bangsa) yang di beri hak menentukan kepengurusan sendiri dan menjabarkan program partai yang sesuai dengan kebutuhan perempuan.

Karena adanya kesetaraan gender menyadarkan kaum perempuan akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan politik; melakukan upaya pemberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan untuk meningkatkan peran politik perempuan; melakukan kontrol terhadap penguasa dan pelaksana pembangunan dengan memberikan kontribusi optimal dalam menegakkan moral politik; mewujudkan keterwakilan perempuan pada posisi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan di partai politik, lembaga tertinggi dan tinggi negara secara proporsional; serta melaksanakan sosialisasi politik yang berperspektif perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.[14]

Dalam lingkungan NU sendiri terdapat Maklumat akan pengakuan tentang kesetaraan gender yang dikeluarkan pada Munas NU di Lombok pada tahun 1997. Munas tersebut melahirkan suatu keputusan atau maklumat

[13] Wawancara dengan Ibu Nyai Sakinah… 26-05-2009
[14] Wawancara dengan Ibu Nyai Wafiroh Ma'sum…26-05-2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang "Kedudukan Perempuan Dalam Islam" (*Makanah al-Mar'ah fil Islam*). Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam maklumat tersebut dapat disimpulkan dalam 5 (lima) poin berikut:

a. Islam mengakui eksistensi perempuan sebagai manusia yang utuh dan karenanya patut dihormati.
b. Islam mengakui hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam hal pengabdian kepada agama, nusa, dan bangsa.
c. Islam mengakui adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan karena perbedaan kodrati.
d. Islam mengakui peran publik perempuan di samping peran domestiknya.
e. Ajaran Islam yang menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki itu dalam realitasnya telah mengalami distorsi akibat pengaruh kondisi sosial dan budaya.

Menarik dicatat bahwa Munas kali ini secara intens membahas masalah demokrasi dan hak-hak asasi manusia (HAM), dua isu yang sedang menjadi tema pokok dalam setiap diskursus ilmiah, baik dalam forum nasional maupun internasional. Kedua isu itu amat terkait dengan pembicaraan soal kesetaraan gender yang menjadi isu global saat ini. Untuk menyatakan dirinya sebagai organisasi pendukung nilai-nilai demokrasi dan HAM, mau tidak mau NU harus juga menerima ide kesetaraan gender yang tentu saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam implementasinya pada program organisasi disesuaikan dengan tradisi dan nilai-nilai keislaman yang dianut NU.[15]

Maklumat itu sangat strategis dan sangat signifikan, terutama dalam memberi justifikasi upaya-upaya pemberdayaan perempuan di lingkungan NU. Sehingga organisasi-organisasi perempuan yang menjadi Badan Otonom NU, seperti Muslimat, Fatayat dan IPPNU merasa lebih mantap dalam mengelola dan mengembangkan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan perempuan.

F. Peran Politik Perempuan

Peran perempuan di ranah publik memiliki legitimasi yang sangat kuat di dalam islam baik secara teologis, filosofis, normatif maupun kultural. Secara struktural, sepanjang sejarah Nahdlatul Ulama (NU) memang tidak pernah di pimpin oleh seorang perempuan, tetapi secara kultural perempuan di lingkungan pesantren memiliki peluang yang sangat besar untuk berpartisipasi di ruang publik bahkan menjadi pemimpin di tingkat nasional. NU mendirikan organisasi perempuan seperti Muslimat, Fatayat dan Ikatan

Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) saya kira salah satu di antara tujuanya adalah memberikan ruang untuk pengkaderan politik bagi perempuan. Pengertian politik di sini dalam pengertian secara luas, sebagai

[15] Wawancara dengan Ibu nyai Wafiroh Ma'sum.. 26-05-2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sarana perjuangan untuk mencapai perubahan kondisi yang lebih baik (amar ma'ruf nahi mungkar).

Keputusan tersebut tidak hanya membaggakan perempuan di lingkungan pesantren karena telah memiliki landasan yuridis yang sah, tetapi di jadikan pegangan juga oleh gerakan perempuan dan lembaga-lembaga di luar struktur NU dalam melaksanakan penyadaran terhadap kaum perempuan di Indonesia.[16] Dalam keputusan tersebut secara tegas mensyaratkan Kualitas, Kapasitas, Kapabilitas dan ekseptabilitas. Syarat-syarat tersebut berlaku umum bagi laki-laki maupu perempuan dan selayaknya dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan pemimpinan bangsa, tanpa terjebak secara seksis.

Secara kelembagaan, fatayat NU sebagai badan otonom NU saat ini memerankan peran politiknya dengan kerja-kerja advokasi untuk pemberdayaan perempuan. Sekedar contoh, Fatayat NU berhasil mewarnai bahtsul masail pada munas NU di Surabaya tahun 2006 mengenai pencegahan trafiking. Mungkin pertama kali terjadi dalam sejarah NU, agenda dan rumusan naskah akademik yang berisi argumentasi *Fikhiyah* dengan referensi literatur kitab kuning yang mu'tabar sebagai rujukan (*maraji'*)nya disiapkan dan di tulis sepenuhnya oleh tim pucuk pimpinan fatayat NU yang seluruhnya adalah perempuan.

[16] Mariah Ulfah Anshor, *Saatnya Perempuan Menantang Panggung Politik*, h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di awal reformasi, Khofifah Indar Parawansah sebagai Menteri pemberdayaan perempuan saat Gus Dur atau K.H. Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI, ia mampu mendorong lahirnya intruksi presiden no. 9 tahun 2000 tentang pengurus utamakn gender dala pembangunan Nasional.[17]

Selain itu secara eksplisit di sebutkan bahwa dalam konteks peran publik menuret prinsip islam, perempuan di perbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengen konsekwensi bahwa ia dapat di pandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran dan sosial politik tersebut. dengan kata lain bahwa kedudukan perempuan dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama peranya dalam masyarakat mejemuk ini, dengan mengingat bahwa kualitas, kapasitas dan kapabilitas dan ekseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati perempuan sebagai sebuah keniscayaan.

[17] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERAN POLITIK PEREMPUAN PESANTREN MENURUT FIQIH SIYASAH PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KABUPATEN GRESIK

A. Peran Politik Perempuan Pesantren Ihyaul-Ulum Dukun Gresik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009

Dari urain di atas dapat di ambil analisa bahwa pondok pesantren ihyaul ulum terlibat dalam dunia politik karna memang person-personya aktif di dunia politik. Dalam pemahaman para perempuan pondol pesantren ihyaul-ulum, dunia politik merupakan bagian dari media perjuangan dalam menyiarkan dakwah islamiyah. Pola ketrlibatan perempuan pesantren ihyaul-ulum dalam politik tidak sebatas peran pasif tetapi aktif; baik dalam rangka mendukung partai maupun penguasa tertentu dalam mendelegasikan salah satu pengurus pondok npesantren ihyaul-ulum untuk menjadi calon dalam menduduki jabatan tertentu.

Terpilihnya perempuan berlatar belakang pesantren, menunjukkan bahwa secara kultural, posisi politik perempuan menunjukkan perkembangan signifikan. Perempuan pesantren ternyata mampu menjadi anggota dewan. Sebuah prestasi yang pantas diapresiasi.

Dalam posisinya sebagai pengasuh pesantren sekaligus anggota dewan, seorang perempuan menunjukkan pengaruhnya—baik di bidang pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun politik. Hal ini merupakan sebuah nilai plus atas keterbukaan masyarakat Gresik dalam proses kesetaraan gender, baik di bidang politik maupun pendidikan. Bahkan jika di lihat prosentase keterwakilan kaum rakyat di kursi anggota dewan, terutama di Jawa Timur, menunjukkan perkembangan wacana kesetaraan gender yang mulai diterima masyarakat. Mereka juga banyak yang berlatar belakang sebagai pengasuh maupun pengajar di pesantren

Bagi PKB kelekatan dengan NU merupakan keniscayaan jika ingin tampil secara signifikan dalam kancah politik Indonesia. Hampir bisa dipastikan, tanpa dukungan NU, warga Nahdliyyin juga memberikan suaranya secara lebih banyak dalam Pemilu 1999 lalu kepada parpol-parpol Nahdliyyin lain, seperti Partai Nahdlatul Ummah (PNU), Partai Kebangkitan Umat (PKU), atau bahkan kepada Partai SUNI.

Dengan terseretnya perempuan pesantren ke dalam politik, maka "*political-oriented*" mendapatkan momentumnya, yang pada gilirannya mengorbankan sebagian perempuan lain yang berusaha memelihara NU pada relnya yang benar sebagai organisasi sosial keagamaan sesuai dengan Khittah 1926. Kyai-kyai berorientasi politik kelihatan cukup sadar tentang hubungan yang erat antara knowledge and power (pengetahuan dan kekuatan), bahwa ilmu—apalagi ilmu agama—yang memiliki aura ilahiah—dapat diaktualisasikan ke dalam politik dan kekuasaan. Reformasi dan liberalisasi politik merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

momentum yang sangat baik bagi para kyai berorientasi politik untuk tampil kembali.

Kemudian elemen selanjutnya yang dapat di manfaatkan untuk menimbulkan motifasi partisipasi politik kaum nahdiyin adalah aspek ekslusivisme NU yang di wujudkan melalui tradisi pesantrenya dan basis dukungan tanpa reseve dari komunitas pluralis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa komunitas rural dengan sekian banyak karakteristiknya, merupakan komunitas yang sangat di andalkan oleh elite NU untuk mendapatkan legatimasi patronase kehidupan sosial, ternasuk dalam kehidupan politik. Realita kultural yang menunjukan komunitas NU sebagai komunitas yang eksklusif bukan inklusif, semakin manambah prediksi bahwa kedua elemen terakhir ini dapat di manfaatkan untuk memotivasi setiap individu dalam berpartisipasi aktif di bidang politik, minimal melalui pemberian suara pada saat pemilihan umum berlangsung.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran politik perempuan Dalam Proses Pemilu Legislatif

Dari Apa yang telah saya paparkan dari beberapa catatan terhadap beberapa argumentasi mereka yang berkata bahwa Islam tidak memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin dengan hadist

... لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ اِمْرَأَةٌ (رواه البخارى)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "tidak akan berjaya suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka"(H.R. Bukhari)

Hadits ini dari segi riwayah tidak seorangpun pakar Hadits yang mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi *diroyah; dalalah* hadits ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang tampuk kekuasaan negara.

Latar belakang turunnya hadits ini memang ditujukan kepada masyarakat Persi yang menyerahkan urusan kekuasaan kepada seorang wanita. Akan tetapi, walaupun hadits ini merupakan komentar atas suatu kejadian –pengangkatan wanita menjadi raja–, namun kata "*qaumun*" (*isim jins* dalam bentuk *nakirah*) ini memberikan makna umum (*'aam*). Artinya kata qoum diatas berlaku untuk semua kaum, termasuk kaum muslim di dalamnya. Dalam redaksi hadits itu, Rasul tidak melafadzkan dengan kata*, lan yufliha qaum al-faaris* (tidak beruntung masyarakat Persia), akan tetapi menggunakan kata-kata umum, yakni "*qaumun*"

Beberapa hal yang mempengaruhi belum terwujudnya keserasian jender antara lain; masih kuatnya nilai-nilai sosial budaya yang patriarkis. Nilai-nilai ini yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Keadaan ini di tandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan tidak memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan yang adil dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setara dengan laki-laki. Di samping itu, ketidak tepatan pemahaman ajaran agama seringkali menyudutkan kedudukan dan peranan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.[1]

Islam sebagai agama samawi terakhir, di yakini sebagai agama yang universal tidak terbatas waktu dan tempat. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa islam datang sebagai rahmat bagi alam semesta. Di sisi lain, ajaran islam di yakini sebagai risalah yang sempurna dan dapat di gunakan sebagai pedoman umat manusia.[2] Keadilan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan perlu di ciptakan dengan menciptakan dan mempertegas penafsiran-penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan hadiṡ Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan zamanya atau konteksnya. Kerangka pemikiran ini tidak menyalai tujuan atau maksud tuhan menurunkan syari'at kepada manusia yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Ketika bicara politik, mau tidak mau kita harus berbicara insan politiknya. Insan politik yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai pelaku dan sekaligus obyek politik. Pada dasarnya semua wacana pelaku politik telah menjadi kajian dan ulasan dari kiab-kitab fiqh politik, namun dalam hal ini masih ada wacana pelaku politik yang terlupakan, yaitu wacana politik kaum perempuan. Sebagai salah satu pelaku dan pencipta wacana

---

[1] Khofifah Indar Parawansah. *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi*. h. 23

[2] Ajaran agama Islam mencakup tiga hal yakni akidah, syari'at dan akhlak. Pembagian tersebut di dasarkan atas sabda Nabi Muhammad SAW, tentang Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan dalam kajian fiqh politik. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti *Imamah,* perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan.[3]

Oleh karena itu kedudukan perempuan dalam fiqh politik ini merupakan agenda tersendiri dan sangat penting untuk dilihat. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan berpolitik ada tiga pendapat yang berkembang sebagaimana yang diterangkan di bawah ini.

Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik. Secara eksplisit kelompok ini mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki. Kaum ulama dari golongan dari kelompok Khawarij dan Musyabbihah menggunakan dalil-dalil al-Qur'an tentang konsep *'adālah* (keadilan) dan *musawah* (persamaan) yang selalu dijunjung tinggi dalam Islam. dan juga

[3] Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikiurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam,* h. 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai organisasi Islam terbesar di indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) tidak saja selalu menghiasi wacana publik Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan dan pemikiran keislaman yang berwawasan kebangsaan, respon terhadap perubahan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal nusantara. NU selalu memposisikan diri sebagai jangkar nusantara, terutama yang digalang oleh kader-kader mudanya.

Mereka mempunyai gagasan keagamaan progresif dalam merespon modernitas dengan menggunakan basis pengetahuan tradisional yang mereka miliki setelah di persentuhkan dengan pengetahuan baru dari berbagai khazanah modern. Mereka tidak hanya peduli dengan modernitas yang terus di kritik dan disikapi secara hati-hati, tetapi juga melakukan revitalisasi tradisi.[4]

Dalam konteks ini, NU menjadikan kepercayaan teologis sebagai basis pengembangan masyarakat dengan mengusung isu-isu universal seperti, HAM, demokrasi, civil society termasuk juga kesetaraan gender

Pembagian kerja antara sektor publik dengan domestik adalah pilihan masing-masing individu perempuan dan ini patut di hargai. Kaum feminis memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kancah yang lebih luas dimana perempuan di beri kebebasan dalam memilih dan tidak ada paksaan sebagai ibu rumah tanggah saja. Ia juga memerlukan kehidupan lain di luar yang

[4] http://www.gp-ansor.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Oleh karna itu, pilihan perempuan kemasalah kemasyarakatan dan kenegaraan tidak dapat di abaikan begitu saja.

Agama adalah nasehat bagi laki-laki dan perempuan secara umum dan apa yang lebih dari sekedar nasihat, berupa tugas pengawasan atas para pejabat yang pengawasan itu merupakan satu cabang dari *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* juga.[5]

Dua tugas berupa pembuatan perundang-undangan dan pengawasan atas wewenang eksekutif, merupakan tugas "umat khusus" yang di wajibkan oleh Allah atas umat umum baik laki-laki maupun perempuan untuk membentuknya.

Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

Artinya ; *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar"* (QS. Ali imrān: 104).[6]

Selain itu, secara eksplisit disebutkan bahwa. Dalam konteks peran publik menurut prinsip Islam, perempuan di perbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekwensi bahwa ia dapat di pandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut.

[5] Farid Abdul Khaliq,. *Fikih Politik* Islam, hal. 129
[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain bahwa kedudukan perempuan dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama peranya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati perempuan sebagai sebuah keniscayaan.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-urain yang telah di kemukakan di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut

1. perempuan pesantren Ihyaul Ulum Gresaik telah ikut andil peran dalam pemilu legislatif tahun 2009 yaitu sebagai calon legislatif hingga mampu memghaantarkan salah atu dari mereka terpilih sebagai badan anggota legislatif tahun 2009 - 2014

2. Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah memperbolehkan Peran Dan Posisi perempuan pesantren Dalam calon Pemilu Legislatif tahun 2009. perempuan menempati kedudukan penting yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal itu disebabkan islam datang membawa prinsip persamaan di antara seluruh manusia. tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Sebab sebagian dari mereka berasal dari sebagian yang lain. Laki-laki dari perempuan dan perempuan dari laki-laki. Tidaka da perbedaan di antara mereka dalam hal esensi alami.

asalkan kapasitasnya dalam menjalankan tugas sebagai anggota badan legislatif, perempuan harus bertanggung jawab sebagaimana menjadi seorang pemimpin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

Kami sebagai manusia yang banyak kekurangan, kekhilafan tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis menyarankan dengan keterlibatan perempuan pesantren di dunia politik mudah-mudahan apa yang di inginkan masyarakat atau rakyat bisa terwujud dalam menjadikan negara yang tercinta ini menjadi lebih baik dan yang terbaik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini,* Jakarta: Lembaga Ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhinika Tunggal Ika, 2002

Amatullah Shafiyyah, Ahryati Soeripno, Jakarta: Gema Insani, 2003

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005

Fatimah Umar Nasif, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*. Terj. Burhan Wira Subrata, Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2001

Fauzi Ridjal, *Dinamika Gerakan Perempuan Di Indonesia,* Jakarta: Amzah, 2002

Haedar Nashir, *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Hanun Asrohah, dkk, *Perempuan dalam Prespektif dan Aksi*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006

Hibbah Rauf 'Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Husein Muhammad,*Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren,* Jakarta: Pustaka Rihlah, 2006

----------, *Islam Agama Ramah Perempuan,* Yogyakarta: LKIS, 2004

Ikhwan Fauzi, *perempuan dan Kekuasaan, Menulusuri Hak Politik dan Kekuasaan Gender dalam Islam,* Jakarta: Amzah, 2002

Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra politik Kyai,* Malang: UIN Malang Press, 2007

Istibsyaroh, *Hak-Hak Permpuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi,* Jakarta: Teraju Mizan, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jajat Burhanudin. *Ulama Perempuan Indonesia,* Jakarta: Gramedia Pustaka Media, 2002

Khofifah Indar Parawansah, *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997

Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Prespektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999

Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Mohammad Mais Qosim Ja'far, *Perempuan Dan Kekuasaan*. Terj. Ikhwan Fauzi, Jakarta: Azan, 2001

Muhammad Qutub, *Islam The Misunderstood Religion*, Terj. Fungky Kusnaedi Timur, *Islam Agama Pembebasen*, Jakarta Timur: Pustka al-Kautsar, 1997

M. Abdul Karim, dkk. *Wacana Politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Suka Press, Cetakan I, 2007

M. Toyyib, *Islam Ahlussunah Waljama'ah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2002

Pius A. Partanto, dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola, 1994

Siti Musdah Mulia & Anik Faridah, *Perempuan dan Politik*, Bandung: Mizan, 2003

Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Bandung: Mizan. 2002

Sarwono Kusumaatmaja, *Politik dan Perempuan*, Depok: Koekosan 2007

Soeleiman Fadeli Mohammad Subhan, S.Sos. *Antologi NU, Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah.* Jakarta: Pustaka Ma'arif NU, 2007

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1,* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, 1987

Syafiq Hasyim, H*al-Hal Yang Tak Terpikiurkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan. 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syekh Syaukat Hussein, *HAM dan Islam*. Terj. Abdul Rochim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Zaitunah Subhan. *Perempuan dan Politik dalam Islam*., Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2006

Undang-Undang PEMILU, Yogykarta: Universitas Atma Jaya. 2008

Qualita Ahsana, *Jurnal of Indonesia Islam Community Researc*, Surabaya, 2007

Mariah Ulfah Anshor, *Saatnya Perempuan Menantang Panggung Politik,* Jurnal

www. gp-ansor.com

Wawancara dengan Ibu Nyai Wafiroh Ma'sum. 26-05-2009

Wawancara dengan Ibu Nyai Sakinah Ma'sum. 26-05-2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id